

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA

TRIBUNAN 4

Nama : BAYU PANCOROADI, S.T., M.T.
NIP : 197412092003121002
Pangkat/Gol Ruang : Pembina Tingkat I / IV/b
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

| NO | KINERJA | INDIKATOR KINERJA INDIVIDU | RENCANA AKSI | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) | CATATAN MONEV | TINDAK LANJUT | BUKTI DUKUNG |
|----|---|---|---|---------|-----------|-------------|---|--|--------------|
| 1 | Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif | - Indeks Reformasi Birokrasi Peringkat Daerah | Melaksanakan tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif pada perangkat daerah | 80.01 % | 79.39 % | 99.23 % | Telah melakukan koordinasi dan supervisi secara berkesinambungan pada setiap proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi capaian Reformasi Birokrasi guna memastikan bahwa seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan RB Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang berjalan sesuai dengan ketentuan. sekaligus sebagai dasar dalam pengambilan keputusan serta penyusunan langkah tindak lanjut dan perbaikan berkelanjutan hingga capaian RB dapat terlaksana secara efektif, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kinerja organisasi | -Memperkuat monitoring internal serta evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program Reformasi Birokrasi - Mendorong optimalisasi inovasi dan transformasi digital guna meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan - Optimalisasi Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah | |
| 2 | Meningkatnya penyelenggaraan infrastruktur jalan, air irigasi | - Cakupan Layanan Jalan dan Sumber Daya Air dengan persentase 70% | Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pembinaan terhadap penyelenggaraan infrastruktur jalan dan monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan pembagian air irigasi sesuai dengan RTTG melalui dokumen operasi (blangko O) dari masing-masing UPT PSDA | 52.37 % | 52.63 % | 100.50 % | Layanan Jalan dan Sumber Daya Air Bidang Bina Marga memiliki peran strategis dengan bobot kontribusi sebesar 60% dalam mendukung pencapaian 70% cakupan layanan jalan dan sumber daya air. Pada Tahun 2025, pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Bina Marga berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga target yang direncanakan dapat tercapai secara optimal. Capaian persentase jalan mantap pada Tahun 2025 mencapai 75,84%, yang menunjukkan ketercapaian target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kinerja Bidang Bina Marga memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan cakupan layanan jalan. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kegiatan pemeliharaan dan rekonstruksi jalan, sekaligus menunjukkan keselarasan antara target pembangunan infrastruktur jalan dengan kebutuhan pelayanan masyarakat. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, pelaksanaan rencana aksi pada Bidang Sumber Daya Air menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian indikator kinerja individu Cakupan Layanan Jalan dan Sumber Daya Air. Dari target sebesar 52,37%, realisasi yang dicapai sebesar 52,63%, atau setara dengan 100,5% capaian kinerja, yang menandakan kinerja melampaui target yang telah ditetapkan. Pada layanan irigasi, realisasi cakupan layanan air irigasi mencapai 74,2%. Capaian ini diperoleh dari pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi, serta pengendalian pembagian air irigasi yang dilakukan secara konsisten sesuai dengan Rencana Tata Tanam Global (RTTG), dengan mengacu pada dokumen operasi Blangko O yang disusun oleh masing-masing UPT PSDA. Bidang Sumber Daya Air memberikan kontribusi sebesar 40% , hal ini mencerminkan efektivitas pengelolaan layanan air irigasi dan pengendalian layanan air irigasi secara terukur dan berkelanjutan. Secara keseturuhan Layanan Jalan dan Sumber Daya Air pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik dan selaras dengan target perencanaan. Kontribusi masing-masing bidang—60% dari Bina Marga dan 40% dari Sumber Daya Air—telah saling melengkapi dalam mencapai dan bahkan melampaui indikator kinerja cakupan layanan jalan dan sumber daya air. Hal ini mencerminkan keberhasilan pengelolaan program, koordinasi antarbidang, serta efektivitas pelaksanaan kebijakan pembangunan infrastruktur daerah. | Bina Marga - Rencana tindak lanjut selanjutnya adalah melakukan percepatan serapan anggaran yang ditetapkan bisa berjalan dengan baik. - Rencana percepatan serapan anggaran dilaksanakan pada triwulan I dan II dengan target 50% dapat terealisasi dan berdampak lebih cepat pada masyarakat, akan dilaksanakan pemetaan pekerjaan dan anggaran agar dapat terealisasi segera dan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Sumber Daya Air Tindak lanjut yang dilakukan meliputi penguatan monitoring dan evaluasi pembagian air irigasi melalui verifikasi dan rekapitulasi dokumen operasi Blangko O dari masing-masing UPT PSDA untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan RTTG. Selanjutnya dilakukan evaluasi hasil pelaksanaan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan, termasuk pemutakhiran data kondisi jaringan irigasi dan penguatan koordinasi teknis dengan UPT PSDA. Selain itu, dilakukan peningkatan pembinaan dan pengendalian distribusi air irigasi pada daerah irigasi kewenangan. Upaya ini diarahkan untuk menjaga konsistensi capaian kinerja serta meningkatkan kualitas pengelolaan pembagian | |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--------|--------|---------|---|---|
| 3 | Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum | - Indeks capaian layanan dan pembangunan infrastruktur sektor pekerjaan umum | Melaksanakan supervisi terhadap layanan dan pembangunan infrastruktur sektor PU | 0.6487 | 0.6623 | 102.10% | <p>Indeks capaian layanan dan pembangunan infrastruktur disusun dari 2 komponen utama, Cakupan Layanan Jalan dan Sumber Daya Air dengan persentase 70% dan Cakupan layanan bangunan gedung dan penataan ruang dengan persentase 30%. Pembagian proporsi tersebut didapatkan dari hasil capaian pelaksanaan program pada setiap bidang di Dinas PUPR, Bidang Bina Marga, Sumber Daya Air, Tata Ruang dan Tata Bangunan. Setiap Bidang berkontribusi sesuai dengan bobot pembagiannya untuk setiap hasil cakupan layanan, Bina Marga (60%) + SDA (40%), Tata Ruang (65%) + Tata bangunan (35%). Secara agregat, sebagian besar indikator program dan kegiatan telah mencapai target yang direncanakan hingga Triwulan IV Tahun 2025. Hal ini menunjukkan persiapan dan pelaksanaan kegiatan yang tertata. Realisasi anggaran dan kinerja menunjukkan korelasi kuat, namun terdapat beberapa area di mana realisasi anggaran lebih rendah dari target kinerja, yang perlu dianalisis lebih lanjut dari sisi efisiensi atau hambatan administrasi.</p> | <p>air irigasi pada periode.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perlu penajaman strategi dan penurunan risiko kerja lapangan (mis. logistik, cuaca, pelaksanaan teknis) agar capaian indikator kinerja fisik tidak tertinggal. - Penguatan SOP triwulanan diperlukan agar semua indikator teknis terutama pemeliharaan fasilitas fisik dan substansi layanan teknis tercapai optimal tanpa menunggu akhir tahun. penguatan SOP sangat diperlukan terlebih menyangkut capaian teknis, karena setiap minggu bahkan hari terdapat progress fisik yang terus tercatat dan dilaporkan sehingga, diperlukan sebuah pendekatan untuk bisa menangkap seluruh aktivitas khusus yang di PUPR agar tercatat dan dapat dipahami, serta bisa dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan oleh pimpinan. |
| 4 | Meningkatnya layanan bangunan gedung dan penyelenggaraan penataan ruang | Cakupan layanan bangunan gedung dan penataan ruang dengan persentase 30% | Melakukan monitoring dan evaluasi dokumen rekomendasi teknis PBG dan SLF dan monitoring evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penataan ruang untuk pembangunan daerah yang sesuai dengan rencana tata ruang | 12.51% | 13.60% | 108.71% | <p>Pada tahun 2025, cakupan layanan bangunan gedung di Kabupaten Jombang menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan meskipun masih menghadapi sejumlah keterbatasan. Dari total 4.271 bangunan gedung negara, telah tercapai layanan legger terhadap 2.703 bangunan, layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebanyak 408 permohonan, serta layanan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sebanyak 8 dokumen kajian SLF Bangunan Gedung Negara. Namun demikian, dokumen kajian SLF tersebut baru memiliki bobot 60% karena belum seluruhnya diterbitkan menjadi SLF, sehingga indeks layanan SLF hanya mencapai 10,2. Berdasarkan formulasi yang digunakan untuk menghitung cakupan layanan bangunan gedung, yaitu: $35\% \times ((\text{jumlah BGN yang memiliki legger} \times 30\%) + (\text{jumlah BGN yang memiliki PBG} \times 40\%) + (\text{jumlah BGN yang memiliki SLF} \times 30\%)) / \text{jumlah total BGN}$ maka diperoleh nilai cakupan layanan bangunan gedung sebesar 0,08007 atau 8,007%. Nilai ini mencerminkan bahwa layanan bangunan gedung telah berjalan namun masih memerlukan peningkatan, khususnya pada aspek penerbitan SLF sebagai dokumen akhir yang memiliki peran penting dalam menjamin kelaikan fungsi bangunan. Sementara itu, layanan penataan ruang memiliki bobot yang lebih besar, yaitu 65%, dalam mendukung capaian sasaran sebesar 30% cakupan layanan bangunan gedung dan penataan ruang. Pada tahun 2025, penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan melalui program yang berfokus pada target kinerja "Terselenggaranya penataan ruang sesuai ketentuan" dengan indikator utama Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang (IPPR). IPPR pada tahun 2025 telah memenuhi target yang ditetapkan, baik dari sisi kinerja maupun penyerapan anggaran. Capaian IPPR diperoleh dari empat aspek utama. Pada aspek perencanaan tata ruang, telah ditetapkan RDTR Wilayah Perencanaan Ploso melalui Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2025 yang ditetapkan pada tanggal 13 Januari 2025. Selain itu, telah diselesaikan administrasi dokumen persetujuan substansi RDTR pada 5 wilayah perencanaan (Peterongan, Tembelang, Perak, Bandarkedungmulyo, dan Diwek) serta penyusunan materi teknis pada 6 wilayah perencanaan lainnya (Kabuh, Kudu, Megaluh, Sumobito, Gudo, dan Wonosalam). Pada aspek pembinaan tata ruang, kegiatan dilaksanakan melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan sosialisasi kepada pemangku kepentingan terkait. Aspek pemanfaatan ruang memberikan kontribusi paling tinggi dalam pembentukan IPPR, yang ditunjukkan oleh tingginya jumlah permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), yaitu sebanyak 139 permohonan yang telah ditindaklanjuti, serta tersusunnya Dokumen Sistem Pengendalian Pemanfaatan Ruang (SPPR) Jangka Pendek Tahun 2025. Adapun aspek pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang serta penilaian kepatuhan</p> | <p>Sebagai tindak lanjut kedepan untuk meningkatkan layanan bangunan gedung dan penyelenggaraan penataan ruang diantaranya adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen legger, pelayanan PBG dan pelayanan SLF - Meningkatkan kapasitas dan optimalisasi SDM dalam rangka peningkatan pelayanan PBG dan SLF kepada masyarakat - Meningkatkan koordinasi dengan lintas perangkat daerah di Kabupaten Jombang, pemerintah provinsi dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, dan Kementerian ATR/BPN dalam rangka percepatan penyusunan dokumen RDTR - Mengintegrasikan RDTR yang telah ditetapkan secara elektronik ke dalam sistem OSS untuk mendukung kepastian pemanfaatan ruang dan percepatan layanan perizinan berusaha - Meningkatkan kapasitas dan optimalisasi SDM dalam rangka peningkatan kualitas dokumen RDTR, melaksanakan sosialisasi penataan ruang kepada masyarakat, optimalisasi penggunaan anggaran, serta mengupayakan penyesuaian cepat terhadap perubahan regulasi. |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------|--|--|
| | | | | | <p>terhadap pelaksanaan KKPR dan Pernyataan Mandiri Pelaku UMK. Keberhasilan penyelenggaraan penataan ruang tersebut didukung oleh kemudahan perizinan berusaha melalui sistem OSS-RBA, kemudahan akses layanan informasi tata ruang secara elektronik, peran aktif seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta dukungan berupa supervisi dan pendampingan dari Kementerian ATR/BPN dan koordinasi lintas perangkat daerah yang berjalan dengan baik. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia untuk melakukan monitoring rekomendasi pemanfaatan ruang, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap ketentuan penataan ruang, serta dinamika perubahan regulasi yang relatif cepat tanpa diikuti sosialisasi yang memadai. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, cakupan layanan penataan ruang dalam mendukung realisasi sasaran "Meningkatnya Layanan Bangunan Gedung dan Penyelenggaraan Penataan Ruang" mencapai 57,44%, dengan rincian Indeks Perencanaan Tata Ruang sebesar 3,71%, Indeks Pembinaan Tata Ruang sebesar 16,25%, Indeks Pemanfaatan Ruang sebesar 19,42%, dan Indeks Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebesar 18,06%. Dengan bobot sebesar 65%, maka nilai cakupan layanan penataan ruang adalah: $65\% \times 57,44\% = 37,34\%$ Selanjutnya, dengan menggabungkan cakupan layanan bangunan gedung sebesar 8,007% dan cakupan layanan penataan ruang sebesar 37,34%, maka capaian total cakupan layanan bangunan gedung dan penataan ruang terhadap bobot sasaran 30% adalah: $30\% \times (8,007\% + 37,34\%) = 13,60\%$ Hasil tersebut menunjukkan bahwa capaian layanan bangunan gedung dan penyelenggaraan penataan ruang pada tahun 2025 sebesar 13,60% telah melampaui target kinerja. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kualitas dan efektivitas layanan yang diberikan, serta menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang dalam bidang bangunan gedung dan penataan ruang telah berjalan dengan baik dan melebihi ekspektasi yang ditetapkan.</p> | |
| | | | | Rata-rata capaian | 102,64% | |

Atasan Langsung

H. Warsubi, S.H., M.Si.

Jombang, 02 Februari 2026
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang



Bayu Pancoroadi, S.T., M.T.
NIP. 19741209 200312 1 002

EVALUASI KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF

PERIODE: Tahun 2025 (Tahunan)

PEMERINTAH KAB. JOMBANG

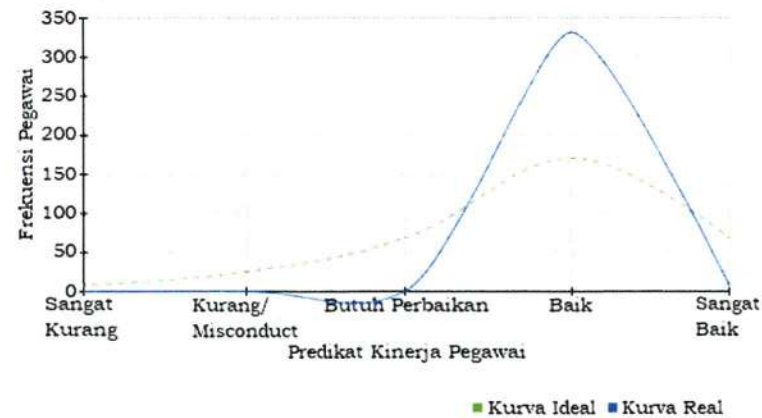
PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2025

| NO | PEGAWAI YANG DINILAI | | NO | PEJABAT PENILAI KINERJA | |
|----|----------------------|--|----|-------------------------|--|
| 1 | NAMA | IMAM BUSTOMI, ST. | 1 | NAMA | BAYU PANCOROADI, ST, MT |
| 2 | NIP | 197710262001121003 | 2 | NIP | 197412092003121002 |
| 3 | PANGKAT/ GOL. RUANG | Pembina Tingkat I / IV/b | 3 | PANGKAT/ GOL. RUANG | Pembina Tingkat I / IV/b |
| 4 | JABATAN | Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 4 | JABATAN | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 5 | UNIT KERJA | Sekretariat | 5 | UNIT KERJA | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
BAIK

POLA DISTRIBUSI:

KURVA DISTRIBUSI PREDIKAT KINERJA PEGAWAI DENGAN
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI BAIK



| HASIL KERJA | | | | | | | |
|---|---|---|--|--------------------------------------|-----------------------------|---|--|
| NO | RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI | RENCANA HASIL KERJA | ASPEK | INDIKATOR KINERJA INDIVIDU | TARGET / SESEUAI EKSPEKTASI | REALISASI BERDASARKAN BUKTI DUKUNG | UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| UTAMA | | | | | | | |
| 1 | Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah | Kualitas | Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah | 75,05% | 75,05% berdasarkan Laporan Kinerja Dan Hasil Evaluasi AKIP Dinas PUPR | Pimpinan: Sesuai ekspektasi, realisasi kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan 📌 |
| TAMBAHAN | | | | | | | |
| RATING HASIL KERJA SESUAI EKSPEKTASI | | | | | | | |
| PERILAKU KERJA | | | | | | UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG | |
| 1 | Berorientasi Pelayanan | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti | | Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjadi role model bagi pegawai lain dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan SOP dan peraturan yang berlaku | | | Pimpinan: Telah memenuhi ekspektasi 📌 | |
| 2 | Akuntabel | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan | | Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menyelesaikan pekerjaan yang telah menjadi tanggungjawab dengan penuh rasa tanggungjawab | | | Pimpinan: Telah memenuhi ekspektasi 📌 | |
| 3 | Kompeten | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik | | Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memecahkan masalah terkini dengan meningkatkan kompetensi diri terutama dalam hal pelayanan serta membantu pegawai lain dalam pemahaman terkait dalam peningkatan kompetensi | | | Pimpinan: Telah memenuhi ekspektasi 📌 | |
| 4 | Harmonis | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif | | Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjadi role model untuk pegawai lainnya dalam upaya menciptakan lingkungan kerja kondusif | | | Pimpinan: Telah memenuhi ekspektasi 📌 | |
| 5 | Loyal | | | | | | |

| PERILAKU KERJA | | UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG |
|---|--|---|
| - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara | Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjadi role model untuk pegawai lain dalam hal loyalitas sebagai pegawai negeri sipil | Pimpinan: Telah memenuhi ekspektasi 🟢 |
| 6 Adaptif | | |
| - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif | Ekspektasi Khusus Pimpinan: Mengimplementasikan perkembangan teknologi untuk memperbaiki metode dan proses kerja | Pimpinan: Telah memenuhi ekspektasi 🟢 |
| 7 Kolaboratif | | |
| - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama | Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bekerja sama, memanfaatkan berbagai sumberdaya , dan menerima masukan dari berbagai pihak terkait | Pimpinan: Telah memenuhi ekspektasi 🟢 |
| RATING PERILAKU KERJA DIATAS EKSPEKTASI | | |
| PREDIKAT KINERJA PEGAWAI BAIK | | |

Pegawai yang Dinilai



IMAM BUSTOMI, ST.
197710262001121003

Jombang, 9 Januari 2026
Pejabat Penilai Kinerja



BAYU PANCOROADI, ST, MT
197412092003121002



DOKUMEN EVALUASI KINERJA PEGAWAI

PERIODE : TAHUN 2025 (TAHUNAN)

PEMERINTAH KAB. JOMBANG

PERIODE PENILAIAN:

1 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2025

| | | |
|----|--------------------------------|--|
| 1. | PEGAWAI YANG DINILAI | |
| | NAMA | : IMAM BUSTOMI, ST. |
| | NIP | : 197710262001121003 |
| | PANGKAT/GOL RUANG | : Pembina Tingkat I / IV/b |
| | JABATAN | : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | UNIT KERJA | : Sekretariat |
| 2. | PEJABAT PENILAI KINERJA | |
| | NAMA | : BAYU PANCOROADI, ST, MT |
| | NIP | : 197412092003121002 |
| | PANGKAT/GOL RUANG | : Pembina Tingkat I / IV/b |
| | JABATAN | : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | UNIT KERJA | : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 3. | ATASAN PEJABAT PENILAI KINERJA | |
| | NAMA | : WARSUBI |
| | NIP | : |
| | PANGKAT/GOL RUANG | : |
| | JABATAN | : Bupati |
| | UNIT KERJA | : Pemerintah Kabupaten Jombang |
| 4. | EVALUASI KINERJA | |
| | CAPAIAN KINERJA ORGANISASI | : BAIK |
| | PREDIKAT KINERJA PEGAWAI | : BAIK |
| 5. | CATATAN/REKOMENDASI | |
| | | |

Jombang, 9 Januari 2026

7. Pegawai yang Dinilai

IMAM BUSTOMI, ST.
197710262001121003

Jombang, 9 Januari 2026

6. Pejabat Penilai Kinerja

BAYU PANCOROADI, ST, MT
197412092003121002

KERTAS KERJA PENETAPAN TARGET

DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN JOMBANG

Nama : IMAM BUSTOMI, S.T.

NIP : 197710262001121003

Jabatan : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tugas pokok : Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, penyusunan program dan evaluasi.

Fungsi :

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. Pengelolaan administrasi aset;
- f. Pengelolaan urusan rumah tangga;
- g. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran, dan perundang-undangan;
- h. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- i. Pengelolaan kearsipan;
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
- k. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Aparatur Sipil Negara; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

| No | Indikator Kinerja Utama/ Individu | Keterkaitan dengan Komponen Perencanaan Program/ Kegiatan/ | Target Tahun N-1 | Realisasi Tahun N-1 | Target Tahun N | Satuan | Analisi/Dasar Penetapan |
|----|---|---|------------------------|------------------------|----------------------|--------|---|
| 1 | Persentase pelaporan aset yang tersusun sesuai aturan | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 100 | 100 | 100 | % | Matriks Peran Hasil dan Matriks Renstra |
| 2 | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 | 100 | 100 | % | Matriks Peran Hasil dan Matriks Renstra |
| 3 | Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 | 100 | 100 | % | Matriks Peran Hasil dan Matriks Renstra |
| 4 | Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 | 100 | 100 | % | Matriks Peran Hasil dan Matriks Renstra |
| 5 | Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 | 100 | 100 | % | Matriks Peran Hasil dan Matriks Renstra |
| 6 | Persentase Pencairan Gaji dan Tunjangan ASN Tepat Waktu | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 | 100 | 100 | % | Matriks Peran Hasil dan Matriks Renstra |

| No | Indikator Kinerja Utama/ Individu | Keterkaitan dengan Komponen Perencanaan Program/Kegiatan/ | Target Tahun N-1 | Realisasi Tahun N-1 | Target Tahun N | Satuan | Analisis/Dasar Penetapan |
|----|--|--|---------------------|------------------------|-------------------|---------|--|
| 7 | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang Tersusun Sesuai Aturan | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7 | 7 | 7 | dokumen | Matriks Peran Hasil dan Matriks Renstra |

Atasan Langsung



Bayu Pancoroadi, S.T., M.T.
NIP. 19741209 200312 1 002

Jombang, 17 Oktober 2025
Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum
Dan Penataan Ruang



Imam Bustomi, S.T.
NIP. 19771026 200112 1 003

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN JOMBANG

Nama : IMAM BUSTOMI, S.T.

NIP : 197710262001121003

Jabatan : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tugas pokok : Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, penyusunan program dan evaluasi.

Fungsi :

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. Pengelolaan administrasi aset;
- f. Pengelolaan urusan rumah tangga;
- g. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran, dan perundang-undangan;
- h. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- i. Pengelolaan kearsipan;
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
- k. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Aparatur Sipil Negara; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

| No | Rencana Hasil Kerja | Indikator Kinerja Individu | Definisi Operasional | Formulasi | Sumber Data |
|----|---|---|---|---|----------------------|
| 1 | Tersusunnya pelaporan aset yang sesuai dengan aturan | Persentase pelaporan aset yang tersusun sesuai aturan | Jumlah PBB Gedung Milik Daerah yang terbayar / Jumlah Gedung Milik Daerah X 100% | Jumlah PBB Gedung Milik Daerah yang terbayar / Jumlah Gedung Milik Daerah X 100% | Jumlah SPT Pajak PBB |
| 2 | Terpenuhinya pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah di Dinas PUPR | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah / 12 Bulan X 100% | Jumlah pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah / 12 Bulan X 100% | Dokumen DPA |
| 3 | Terpenuhinya dan terpeliharanya Barang Milik Daerah dalam kondisi baik | Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik | Jumlah Barang Milik Daerah dalam kondisi baik / Jumlah Barang Milik Daerah X 100% | Jumlah Barang Milik Daerah dalam kondisi baik / Jumlah Barang Milik Daerah X 100% | Dokumen DPA |
| 4 | Tersusunnya dokumen laporan keuangan perangkat daerah | Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan | Jumlah laporan Keuangan yang Tersusun Sesuai Aturan / Jumlah Laporan Keuangan X 100 % | Jumlah laporan Keuangan yang Tersusun Sesuai Aturan / Jumlah Laporan Keuangan X 100 % | SIPD |
| 5 | Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran di Dinas PUPR | Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi / Jumlah pelayanan administrasi perkantoran X 100% | Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi / Jumlah pelayanan administrasi perkantoran X 100% | Dokumen DPA |
| 6 | Terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai | Persentase Pencairan Gaji dan Tunjangan ASN Tepat Waktu | Pencairan gaji dan Tunjangan ASN / 14 bulan X 100% | Pencairan gaji dan Tunjangan ASN / 14 bulan X 100% | Laporan Daftar Gaji |